

KONFLIK KERJA DAN MODAL: KONTRIBUSI PERSONALISME DALAM ENSIKLIK *LABOREM EXERCENS*

Petrus Canisius Edi Laksito
STKIP Widya Yuwana
edilaksito@widyayuwana.ac.id

Abstract

*This article wants to discuss the social teaching of Pope John Paul II regarding the conflict between work and capital in his encyclical *Laborem Exercens*. Karl Marx (1818-1883) holds that in an capitalistic industrial world, work is represented by the worker class as work force, while capital is represented by the entrepreneurs, owners or holders of the means of production. In *Laborem Exercens* art. 11-15, the Pope mentions this issue of the relationship of work and capital from the perspective of Christian personalism, proposing the principle of the priority of work over capital as the basis for regulating work in general and industry in particular. From this study, it is hoped that several consequences can be drawn for studies and efforts about work that are based on a personalistic vision of man.*

Keywords: *work, capital, personalism, the priority of work over capital, social doctrine of the Church.*

I. PENDAHULUAN

Perjalanan pemikiran Karol Wojtyła (1920-2005) memasuki periode penting ketika terpilih sebagai Paus tahun 1978. Kedudukan baru sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik itu mengharuskannya mengemudikan bahtera Gereja Katolik sedunia. Kedudukan itu sekaligus menjadi kesempatan baginya untuk menyampaikan pesan, amanat ataupun ajaran yang mencerminkan keyakinan iman dan pandangan moral Katolik kepada umat manusia di seluruh dunia.

Sebagai pemegang wewenang Magisterium Gereja universal, tonggak pertama ajaran Paus di bidang sosial adalah ensiklik *Laborem Exercens*, diterbitkan 14 September 1981. Sedianya, dokumen itu akan terbit 15 Mei 1981, memperingati 90 tahun ensiklik sosial pertama oleh Paus Leo XIII, *Rerum Novarum*, yang terbit 15 Mei 1891. Namun, dua hari sebelum tanggal yang direncanakan, pada 13 Mei 1981, terjadi percobaan pembunuhan terhadap dirinya saat menyambut umat di lapangan St. Petrus. Karol Wojtyła dilarikan ke rumah

sakit. Peluru yang ditembakkan hampir menewaskannya, tetapi syukurlah nyawanya dapat diselamatkan. Karena menjalani perawatan rumah sakit dan pemulihan yang cukup panjang, ensiklik sosial *Laborem Exercens* baru dapat diterbitkan 4 bulan kemudian, 14 September 1981.

Sebagai pemikir filsafat beraliran personalisme, fokus keprihatinan Karol Wojtyła, yang kini menjadi Paus Yohanes Paulus II, adalah martabat manusia sebagai pribadi (*persona*). Meskipun filsafat personalismenya dikembangkan melalui spesialisasinya di bidang etika (tinjauan filsafat terhadap tindakan manusia), tetapi etika itu sendiri disusun berdasar pemikirannya yang lebih mendasar di bidang antropologi (tinjauan filsafat atas realitas manusia itu sendiri). Dengan demikian, filsafatnya tentang dimensi etis tindakan manusia dilandasi oleh suatu pemahaman tertentu tentang pribadi manusia itu sendiri, beserta keluhuran martabatnya yang tak tergoyahkan sebagai pribadi, sebagai subjek utama tindakan.

Sebagai pemikir filsafat, Karol Wojtyła berpijak pada realisme ontologis dan prinsip metafisika St. Thomas Aquinas (1225-1274), untuk menentukan cakupan realitas manusia dan menjangkau kedalamannya, serta untuk menjelaskan arti terdalam tindakan-tindakan manusiawinya. Dalam hal metode, Karol Wojtyła memakai filsafat fenomenologi yang dikembangkan oleh Max Scheler (1874-1928). Fenomenologi yang dipakai sebagai pendekatan, baik untuk mengupas unsur-unsur manusia beserta struktur pembentuk dirinya sebagai *persona* atau pribadi (antropologi), maupun untuk mengkaji tindakan manusia bagi pembentukan dirinya sebagai *persona* (etika).

Upaya Karol Wojtyła untuk merefleksikan kedalaman realitas manusia dan menggali arti tindakannya dilatari dan diperkaya oleh minatnya yang besar pada khasanah iman Kristiani, terutama teologi mistik yang dipelajari dari St. Yohanes dari Salib (1542-1591). Keberadaannya sebagai pemikir Katolik abad ke-20 di Polandia, negeri yang digores tragedi Perang Dunia II dan dibayangi “perang dingin” antara negara-negara Blok Timur yang komunis dan Blok Barat yang liberal, memperkuat dimensi sosial pemikirannya sebagai filsuf personalis. Dengan latar belakang sosio-historis semacam itu, tak heran jika Karol Wojtyła menekankan penghormatan atas keluhuran martabat manusia sebagai pribadi di dalam kancah sosial.

Dalam kajian ini, akan dibahas kontribusi Paus Yohanes Paulus II, khususnya terkait konflik antara kerja dan modal dalam ensiklik *Laborem Exercens*. Menurut Karl Marx (1818-1883), dalam dunia industri yang berciri kapitalis, kerja direpresentasikan oleh kelas buruh sebagai tenaga kerja, dan modal direpresentasikan oleh pengusaha sebagai pemilik modal. Dalam *Laborem Exercens* artikel 11-15, Paus membahas persoalan hubungan kerja dan modal ini

dari perspektif personalisme Kristiani. Dari kajian ini diharapkan dapat ditarik beberapa kesimpulan bagi kajian dan upaya tentang kerja yang didasarkan pada visi personalistik tentang manusia.

II. PEMBAHASAN

2.1. Konflik Antara Kerja dan Modal

Dalam perspektif *Laborem Exercens*, kerja adalah kenyataan agung. Melalui kerja tugas hidup yang dipercayakan Allah kepada manusia sedari awal, yaitu pembangunan dunia telah dilaksanakan (*LE 11*). Kerja tersebut harus dilaksanakan dengan cara manusiawi, terkait erat dengan kodrat manusia sebagai pelaksana kerja.

Selain merupakan kenyataan yang senantiasa melekat pada hidup manusia, kerja juga berdampak besar terhadap nilai dan makna hidup bagi manusia. Bahkan kerja tetap merupakan sesuatu yang baik, meski harus disertai dengan usaha dan jerih payah. Justru manusia dan kehidupannya berkembang berkat cintanya akan kerja.

Sifat kerja yang positif, kreatif, berfungsi mendidik dan mendatangkan manfaat bagi hidup manusia ini harus dijadikan dasar penilaian dan pengambilan keputusan tentang kerja yang berlaku di masyarakat. Maka peraturan yang disusun dan kebijakan yang diambil dalam dunia kerja harus mengindahkan hak-hak manusia yang secara hakiki melekat pada kerjanya. Dengan cara itu, kehidupan manusia dan tujuan keberadaannya di dunia dapat terealisasi selaras dengan keluhuran martabatnya. Di sisi lain, kerja berhadapan dengan tantangan seiring perjalanan sejarahnya. Tantangan ini tampak nyata terutama sejak abad ke-19, pada periode yang melahirkan Revolusi Industri, sekaligus melahirkan ensiklik sosial pertama dalam sejarah Magisterium Gereja, *Rerum Novarum*, oleh Paus Leo XIII tahun 1891.

Tantangan yang muncul akibat industrialisasi ini disinggulkan oleh Karl Marx saat berbicara tentang konflik antara kerja dan modal dalam iklim industrialisasi yang didominasi oleh paham kapitalisme-liberalisme. Kerja, yang dalam pandangan Kitab Suci dan tradisi Kristiani berharkat positif, di era industri oleh Marx dikaji dalam bingkai pertentangan, yaitu antara kelompok pengusaha yang memiliki modal besar di satu sisi dan kelompok buruh yang bekerja untuk mereka di sisi lain (*LE 11*).

Dalam industri, pengusaha memakai modal miliknya untuk membeli alat-alat produksi dan membayar kerja manusia untuk mengoperasikan alat-alat itu sedemikian hingga bahan baku dapat diolah menjadi produk yang dijual secara massal. Semakin cepat proses produksi berlangsung, semakin banyak barang dihasilkan, semakin baik pemasarannya, maka semakin besar pula peluang

pemodal meraih keuntungan. Dengan cara itulah pengusaha memperoleh keuntungan dan melipatgandakan modalnya. Maka modal yang dimiliki oleh pengusaha menjadi lebih besar setelah memperoleh keuntungan dibandingkan dengan modal saat memulai usahanya. Modal itu menjadi modal baru bagi pengembangan usaha selanjutnya, karena itu, meskipun dalam konfigurasi sosial pengusaha berjumlah sedikit, namun memiliki pengaruh besar. Dalam industri, para pengusaha ini menjadi representasi modal.

Sebaliknya, buruh yang bekerja untuk pengusaha sebagai majikan mereka, tidak memiliki apapun selain tenaga yang melekat pada diri mereka. Para buruh tidak memiliki alat produksi. Dalam produksi, buruh berperan melulu dengan tenaga dan kekuatan. Kondisi ini menjadi sumber konflik yang selanjutnya diulas dalam *Laborem Exercens*, yaitu konflik antara kerja di satu sisi dan modal di sisi lain. Buruh, sebagai kelompok terbesar, merupakan representasi kerja. Buruh hanya bisa menyediakan tenaga dan kekuatannya bagi pengusaha. Pengusaha sendiri cenderung menetapkan upah serendah mungkin sebagai imbalan bagi buruh, berdasarkan prinsip “biaya sekecil-kecilnya, keuntungan sebesar-besarnya”. Hal ini menciptakan situasi konflik antara kerja dan modal.

Kondisi konfliktual antara kerja dan modal masih diperparah dengan eksploitasi lain yang tak kalah mengerikan. Misalnya: kurangnya jaminan keselamatan kerja, jaminan kesehatan, dan jaminan kondisi hidup lain bagi buruh dan keluarga mereka agar dapat hidup dan berkembang sebagaimana layaknya manusia (*LE 11*). Kondisi yang menimpa buruh ini, yang dirumuskan oleh Marx sebagai kondisi eksploitasi (*theory of exploitation*) dan pemiskinan (*theory of pauperization*), ujungnya menurut analisis Marx, kelak justru akan membawa kapitalisme pada kehancuran dan kekuasaan atas kerja yang berada di tangan buruh (Malinvaud, 2004: 26).

Konflik nyata di atas, yang terjadi antara buruh dan pengusaha, antara kerja dan modal, dan yang oleh Marx ditafsirkan berujung pada kehancuran kapitalisme dan kemenangan buruh, oleh Marx dimaknai sebagai konflik kelas di bidang ekonomi. Konflik kelas ini, lebih jauh dielaborasi menjadi konflik ideologi: antara kapitalisme berideologi liberal yang berpihak pada kepentingan pemodal dan sosialisme berideologi komunis yang berpihak pada nasib buruh.

Dalam perspektif pertentangan kelas dan ideologi ini, komunisme sebagai doktrin berpretensi ilmiah menjadi juru bicara bagi kelas buruh dan kalangan proletariat dunia. Dalam pendekatan Marxian, konflik nyata antara kerja dan modal harus dieskalasi menjadi konflik kelas yang sistematis, antara kelas buruh dan kelas pengusaha. Konflik kelas ini lebih jauh dipupuk dan dipanasi dengan upaya-upaya ideologis dan konflik-konflik politik yang berujung pada meletusnya revolusi (*LE 11*). Dengan kata lain, dalam pandangan Marxian ini, konflik kelas

bukan sekedar kondisi *real* yang terjadi di masyarakat industri. Konflik kelas adalah sekaligus solusi, jalan keluar yang harus ditempuh dan diperjuangkan sebagai satu-satunya jalan untuk menghapus ketidakadilan.

Perjuangan kelas yang berwatak dialektis ditempuh oleh para buruh dengan tujuan untuk menegakkan keadilan dan mencapai kesamarataan antar semua individu di masyarakat. Ketika kondisi itu tercapai, terwujudlah suatu masyarakat tanpa kelas. Dalam masyarakat tanpa kelas, alat-alat produksi yang semula berada di bawah penguasaan privat pengusaha, dialihkan ke penguasaan kolektif kelas buruh. Dengan kolektivisasi kepemilikan alat-alat produksi, manusia dalam kerjanya tidak lagi mengalami penghisapan oleh para majikan.

Perjuangan menuju kolektivisasi alat-alat produksi dan penciptaan masyarakat tanpa kelas berciri mondial. Perjuangan itu ditempuh dengan upaya politik dan ideologi secara internasional menuju diktator proletariat, dengan cara merebut monopoli kekuasaan, dengan dimotori oleh partai-partai politik yang bekerja di semua sektor sosial di semua negara dan kelompok masyarakat. Dengan adanya monopoli kekuasaan berada di tangan kelas buruh dan diatur secara ketat dalam kendali partai, sistem kolektivisme atas kerja dapat ditegakkan, dan kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dapat dihapuskan. Melalui revolusi sosial di mana-mana, akan tercapai sistem komunis sedunia.

Dalam percaturan sejarah, khususnya sejak akhir tahun 1980-an, komunisme dunia, sebagai perjuangan ideologi-politik, mengalami kemunduran signifikan setelah runtuhnya Blok Komunis di Eropa Timur. Tapi dalam kenyataannya, konflik antara kerja dan modal yang disingkapkan oleh Marx tetap muncul, juga ketika tidak ada lagi perjuangan ideologi-politik komunis di masyarakat. Kajian-kajian kontemporer mengenai konflik antara kerja dan modal (Silver, 1995; Sørensen, 2006) masih tetap relevan. Rupanya kondisi ini terjadi karena sistem produksi dalam dunia kerja tetap menggunakan tenaga manusia yang diupah untuk bekerja bagi pemilik modal.

Dalam kondisi tersebut, pembahasan *Laborem Exercens* art 11-15 tentang konflik antara kerja dan modal kiranya memiliki relevansinya. Relevansi ini nampak khususnya karena visi personalistik dokumen ini saat membahas pokok persoalan di balik konflik antara kerja dan modal, yaitu bahwa manusia sebagai pribadi perlu senantiasa memaknai kerja yang dilakukannya dalam jenis kerja apapun yang dipilihnya, dan bahwa antara kerja manusia dan alam semesta beserta hasil karya manusia sebagai modal kerja terdapat hubungan hakiki yang tidak dapat dipisahkan.

2.2. Prioritas Kerja Atas Modal

Paus Yohanes Paulus II berpendapat, dewasa ini konflik yang disebabkan oleh manusia amat mudah dijumpai. Dalam konflik tersebut, alat-alat teknologi hasil kerja manusia turut berperan penting. Misalnya, ancaman perang nuklir yang membawa kehancuran massal, jelas merupakan suatu keprihatinan tersendiri.

Dalam situasi keprihatinan ini, menurut Paus, ajaran Gereja tentang prioritas kerja atas modal amat perlu ditegaskan (*LE 12*). Prinsip prioritas kerja atas modal berkaitan secara langsung dengan proses produksi, di mana kerja berkedudukan sebagai faktor dasarnya (*efficient cause*), sementara modal, yang meliputi seluruh perangkat alat-alat produksi, merupakan sarannya (*instrumental cause*).

Prinsip prioritas kerja atas modal berakar pada sejarah awali manusia. Dalam Kitab Kejadian, manusia ditugasi menaklukkan bumi, dan semua sumber daya bumi ini diabdikan bagi kepentingan manusia. Namun, satu-satunya cara agar sumber daya itu dapat mengabdikan manusia adalah melalui kerja. Melalui kerja sumber daya yang diberikan pada manusia dapat mendatangkan manfaat bagi manusia. Agar bisa mendatangkan manfaat bagi dirinya, manusia perlu mengambil sebagian kecil kekayaan alam sebagai miliknya untuk dijadikan “bengkel kerja”nya. Dengan kata lain, manusia perlu mengambil kepemilikan atas sumber daya itu melalui kerja, kemudian memanfaatkan sumber daya yang telah dimilikinya untuk kerja.

Prinsip prioritas kerja atas modal juga berlaku di tahap selanjutnya, yang tetap dilandaskan pada hubungan manusia dengan alam sebagai sumber daya. Apapun yang diselidiki manusia, apapun yang dipakainya dalam proses produksi ataupun yang dihasilkannya, semua didasarkan pada kekayaan alam dan sumber daya sebagai “temuan”, yang didapati oleh manusia ketika berjumpa dengan alam (*LE 12*). Semua kekayaan itu merupakan “temuan” yang telah tersedia, dan bukan “ciptaan” atau hasil usaha manusia. Sebagai sumber daya, kekayaan alam itu “siap pakai”, tinggal digali dan dimanfaatkan oleh manusia dalam proses produksi.

Maka dibalik ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat-alat produksi yang terhubung dengan kerja manusia, terdapat prinsip “kesiapsediaan” sumber daya alam untuk melayani manusia dan mendukung kerjanya. Karena itu, dalam setiap tahap kerja, manusia selalu berusaha menempatkan diri sebagai yang pertama atas sumber daya alam, sebagai penguasanya, melawan dominasi “kepemimpinan” sumber daya, yang memang dikaruniakan alam dan Allah bagi manusia sejak awal penciptaan. Lebih jauh, konsep modal tidak hanya meliputi sumber daya yang tersedia. Seluruh alat produksi yang dipakai manusia untuk mengelola sumber daya itu juga merupakan modal. Semua sarana itu merupakan hasil warisan sejarah kerja manusia. Yaitu, semua alat produksi, dari yang paling primitif

hingga ultramodern yang dikembangkan oleh manusia berdasar pengalaman dan olah budinya, mulai dari alat bercocok tanam paling sederhana sampai pada sistem berteknologi tinggi untuk produksi: mesin, pabrik, laboratorium, komputer. Semua yang melayani kerja merupakan hasil kerja. Semua perangkat itu termasuk “modal”, hasil kerja manusia, dan pada perangkat dan peralatan tersebut melekat ciri-ciri penanda kerja manusia.

Sebagai pelaku kerja, manusia harus memanfaatkan peralatan-peralatan yang terus dimodernisasi sebagai alat kerjanya. Maka, agar dapat bekerja dengan baik, manusia harus menguasai hasil kerja orang lain yang telah menemukan, merancang, membuat peralatan-peralatan tersebut, dan yang terus menyempurnakannya. Kemampuan kerja, yaitu kemampuan seseorang untuk ikut bekerja secara aktif dan efisien dalam proses produksi modern, menuntut kesiapan yang makin lama makin besar. Kesiapan itu hanya dapat diperoleh melalui pelatihan serius. Kalau dalam keadaan lain orang melakukan jenis kerja yang tidak membutuhkan latihan atau kecakapan khusus, tetap berlaku prinsip yang sama. Prinsip tersebut adalah bahwa manusia adalah subjek penyebab kerja sesungguhnya (*efficient subject*) dalam proses produksi. Sementara semua peralatan, meski canggih dan sempurna, adalah semata-mata sarana, yang kedudukannya berada di bawah kerja manusia.

Dalam sistem kerja dan dalam seluruh sistem ekonomi, prinsip prioritas kerja atas modal ini, menurut Paus Yohanes Paulus II, harus ditekankan. Keunggulan manusia dalam proses produksi harus digaribawahi dan diutamakan di atas hal lainnya. Segala hal yang tercakup dalam pengertian modal, seberapapun besar, dalam arti sesungguhnya hanyalah seperangkat benda dan alat kerja belaka. Sedangkan manusia adalah subjek kerja. Terlepas dari kerja yang dilakukan, hanya manusia sajalah, pribadi yang memiliki keluhuran martabat tertinggi di tengah alam ciptaan (*LE 12*).

2.3. Kesatuan Modal-Kerja VS Ekonomisme-Materialisme

Melanjutkan uraiannya, Paus menegaskan kesatuan hakiki antara modal dan kerja. Modal, sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari kerja, dan kerja tidak dapat dipertentangkan dengan modal, ataupun sebaliknya. Dalam perspektif kesatuan hakiki antara modal dan kerja itu, manusia yang merupakan pengejawantah kedua konsep itu, yaitu pengusaha dan buruh, juga tidak dapat saling dipertentangkan, karena pada hakikatnya kerja dan modal merupakan suatu kesatuan, maka dalam proses produksi yang diperlukan pertama-tama adalah penataan sistem kerja.

Sistem kerja harus ditata sedemikian rupa agar mampu mengatasi konflik modal dan kerja. Agar konflik itu dapat diatasi, maka prinsip-prinsip prioritas

kerja atas modal, subjektivitas manusia dalam kerja dan partisipasi efektif manusia dalam seluruh proses produksi apapun jasa yang diberikan, perlu diterapkan (*LE* 13). Upaya penataan ini merupakan hal yang mungkin untuk dilakukan, karena sesungguhnya pertentangan antara kerja dan modal tidaklah bersumber dari struktur proses produksi ataupun dari struktur proses ekonomi. Proses ekonomi pada umumnya justru menunjukkan bahwa kerja dan modal terhubung, saling tercampur, saling berkaitan satu sama lain, tak terpisahkan.

Dalam kerja apapun dan di setiap “bengkel” manapun, entah yang paling primitif ataupun yang ultramodern, senantiasa terdapat dua unsur modal bagi kerja yang lebih dahulu diterima sebagai warisan untuk bekerja. Pertama, adanya aneka sumber daya alam yang diperuntukkan bagi seluruh umat manusia. Kedua, adanya perangkat dan peralatan kerja atau teknologi yang terus dikembangkan dan disempurnakan.

Dari perspektif humanistik dan teologis, di dalam kerja, manusia bertindak sebagai penguasa atas alam ciptaan, yang tersedia baginya untuk dikelola dan dikerjakan. Jika toh dalam kerja manusia mempunyai ketergantungan, maka ketergantungan itu pertama-tama merupakan ketergantungan pada Allah Pencipta sebagai “Sumber segala sumber daya”. Selanjutnya, terdapat ketergantungan pada orang-orang lain, yang berjasa bagi manusia karena menyediakan kemungkinan lebih sempurna bagi kerjanya, berkat kerja dan prakarsa mereka yang lebih dahulu ada. Di sini bisa dikatakan, sembari bekerja, manusia juga masuk ke dalam kerja sesamanya.

Selain menggarisbawahi bahwa antara kerja dan modal, seperti terbahas di atas, terdapat kesatuan hakiki yang tak boleh diingkari, juga harus dikatakan bahwa terdapat prinsip keunggulan pribadi manusia terhadap barang-barang. Artinya, segala sesuatu dalam proses produksi yang berupa benda, peralatan, ataupun modal, adalah “kondisi” bagi kerja manusia, dan bukan “subjek impersonal” yang menempatkan manusia dan kerjanya dalam posisi ketergantungan.

Maka, ketika kerja dipisahkan dari modal, dan modal dipertentangkan dengan kerja, dibarengi perspektif impersonal dan ekonomistis pada keduanya, yaitu baik kerja ataupun modal yang dibaca melulu sebagai faktor-faktor produksi belaka, yang terjadi adalah kekeliruan mendasar yang disebut kesesatan ekonomisme (*LE* 13). Di sini kerja manusia dipandang melulu dari sisi tujuan ekonomisnya. Dalam ekonomisme ini terdapat sesat pikir lebih mendalam, yaitu materialisme. Di sini tercakup keyakinan akan keperdanaan dan keunggulan materi atau hal-hal yang bersifat bendawi, sementara hal-hal rohani dan berciri pribadi, seperti kegiatan manusia, nilai-nilai moral, dan sebagainya, dinilai, diukur dan diletakkan dalam posisi di bawah kenyataan bendawi. Sekurang-kurangnya

praktik semacam ini yang belum diteorikan secara penuh, dikategorikan ke dalam materialisme praktis.

Dari pola pikir materialisme pada tahap paling elementer, atau materialisme umum ini, yaitu bahwa “kenyataan rohani” tidak mengandung nilai yang dibutuhkan dalam hidup manusia, berkembanglah materialisme dialektis, yang mengiringi tumbuhnya pola ekonomisme pada kerja manusia. Dalam ekonomisme yang dihembusi materialisme dialektis kerja dipisahkan dari modal. Keduanya ditempatkan sebagai faktor produksi, dan dipertentangkan satu sama lain.

Sebelum materialisme muncul sebagai sistem filsafat dengan rumusan-rumusan yang secara prinsip berciri dialektis, ekonomisme ini rupanya telah mewarnai cara perumusan masalah yang tidak manusiawi. Materialisme, termasuk di dalamnya materialisme dialektis, tidak mampu memberikan penjelasan memadai dan definitif tentang kerja manusia, khususnya dalam keunggulan manusia terhadap modal, dan keunggulan pribadi terhadap barang-barang. Bahkan, dalam materialisme dialektis, manusia bukannya dipandang sebagai pelaku kerja dan penyebab proses produksi, melainkan sebagai semacam “hasil” dari hubungan-hubungan ekonomi dan produksi yang berkembang pada suatu periode tertentu, dan dengan demikian tergantung pada hal-hal yang berciri dasar materi atau bendawi.

Kontradiksi antara kerja dan modal, yang menceraikan modal dari kerja dan mempertentangkan keduanya, membuat kerja seakan hanya sekedar satu unsur dalam proses ekonomi, semata-mata seperti unsur-unsur yang lainnya. Kontradiksi atau pertentangan ini bukan hanya bersumber pada filsafat dan teori ekonomi abad ke-18, yakni liberalisme yang dimotori oleh A. Smith (1723-1790) dan yang ditentang oleh K. Marx (1818-1883) di abad selanjutnya (Larrivee, 2003: 45), tapi pertama-tama berasal dari seluruh praktik ekonomi dan sosial saat itu, yang dicirikan oleh berkembangnya industrialisasi. Pada masa itu, perhatian orang sedemikian tertuju pada pesatnya pertumbuhan kekayaan material dan sarana-sarana, sementara manusia sebagai tujuan dari semua sarana itu diabaikan sama sekali (*LE* 13).

Kesesatan yang praktis ini menghancurkan kerja manusiawi, menurunkan derajat manusia pekerja, dan menyebabkan reaksi sosial berciri etis. Kesesatan ini dalam sejarah pernah terjadi di masa kapitalisme dan liberalisme primitif. Tetapi sejarah dalam keadaan tertentu juga masih terulang, khususnya jika cara berpikir bertolak dari pengandaian-pengandaian yang sama, entah secara teoritis ataupun praktis. Maka, untuk mengatasi kesesatan tersebut secara radikal, menurut Paus, perlu dilakukan perubahan yang memadai, baik dalam teori maupun dalam praktik. Perubahan itu harus mencerminkan adanya keyakinan tegas pada

keunggulan pribadi atas barang-barang, pada keperdanaan kerja manusia terhadap modal dalam arti yang menyeluruh, yaitu modal sebagai keseluruhan perangkat alat-alat produksi (*LE* 13).

2.4. Kerja dan Kepemilikan

Konflik antara kerja dan modal secara langsung terkait dengan kondisi nyata, khususnya dengan orang-orang yang terlibat dalam proses ekonomi. Pertama, buruh yang bekerja tanpa memiliki alat produksi. Kedua, pengusaha yang memilikinya atau orang yang mewakili mereka. Maka di sini jelas, kerja terkait langsung dengan persoalan milik atau kepemilikan. Persoalan ini sejak awal dibicarakan dalam *Rerum Novarum* (1891), dan ditegaskan dalam *Mater et Magistra* (1961). Kedua dokumen itu berbicara tentang prinsip kepemilikan (*ownership*), hak atas milik perseorangan (*private property*), termasuk sarana produksi (*means of production*). Maka, melanjutkan pembahasannya tentang konflik kerja dan modal, Paus Yohanes Paulus II berbicara tentang kerja dan kepemilikan.

Prinsip tentang kepemilikan yang dikemukakan oleh Paus Leo XIII dan Paus Yohanes XXIII dalam kedua dokumen ini bertentangan dengan program kolektivisme pada Marxisme dan berbeda pula dengan program kapitalisme pada liberalisme beserta sistem politik yang diinspirasi olehnya. Dengan liberalisme, perbedaan tentang doktrin kepemilikan terletak di dalam cara bagaimana hak kepemilikan (*right to ownership*) atau harta-milik (*right to property*) itu dimengerti.

Dalam Tradisi Kristiani, hak kepemilikan atau hak atas harta-milik senantiasa diletakkan dalam konteks lebih luas, yaitu hak semua orang untuk menggunakan seluruh alam ciptaan. Berdasarkan prinsip bahwa barang-barang di dunia ini sesungguhnya diperuntukkan oleh Tuhan bagi semua orang, maka hak milik perseorangan (*the right to private property*) yang terdapat pada individu berada di bawah (*subordinated*) hak atas penggunaan bersama barang-barang (*LE* 14). Atas dasar prinsip itu, maka kepemilikan alat-alat produksi tak pernah dapat diletakkan dalam kerangka konflik antara modal dan kerja, apalagi ditujukan untuk mengeksploitasi kerja. Bahkan, alat kerja tak pernah bisa dimiliki demi kepemilikan itu sendiri, karena kepemilikan, baik privat ataupun publik, harus melayani kerja. Dengan melayani kerja, terwujudlah prinsip dasar kepemilikan, yaitu tujuan universal barang-barang (*universal destination of goods*) dan hak atas penggunaan barang-barang itu secara bersama (*right to common use*). Maka dalam perspektif ini “sosialisasi” (pemakaian bersama) alat-alat produksi layak untuk digarisbawahi.

Di kalangan pemikir Katolik sendiri, gagasan kepemilikan bersama alat-alat produksi nampak dalam pemikiran J. Maritain (1882-1973), yang memandang penting bahwa buruh memiliki bagian dan partisipasi aktif dalam tanggung jawab terhadap kehidupan ekonomi melalui *joint ownership of business enterprises* (Shadle, 2018: 66). Gagasan yang sama juga dikemukakan oleh M.D. Chenu OP (1895-1990), yang berbicara tentang “sosialisasi kerja” (*socialization of work*) dalam bingkai suatu “teologi kerja” (*theology of work*). Di sini, para pekerja membentuk persekutuan di antara mereka dengan suatu “bengkel kerja” bersama, di mana kerja dan alat-alat kerja merupakan milik dan sekaligus ekspresi bersama (Shadle, 2018: 70-71).

Dalam perspektif sosialisasi yang memberi ruang pada kebersamaan dalam kerja dan kepemilikan ini, bagi Paus, posisi kapitalisme ketat (*rigid capitalism*), yang membela hak eksklusif kepemilikan privat pengusaha atas alat-alat produksi sebagai dogma ekonomi yang tidak dapat diganggu gugat, tak dapat diterima. Penolakan ini didasarkan atas prinsip hormat terhadap kerja (*respect for work*). Bukan hanya kerja tangan (*manual labour*), tapi juga kerja intelektual, pegawai dan manajemen. Keseluruhan kerja itu secara lintas generasi, sampai dengan generasi sekarang ini, menghasilkan alat-alat produksi sebagai modal kerja, yang berciri milik bersama.

Berdasarkan pengakuan atas posisi kerja dan posisi para pekerja dalam proses produksi inilah, Paus Yohanes Paulus II mengajukan gagasan untuk membarui sistem kapitalisme berdasarkan hak-hak manusiawi (*human rights*), baik hak-hak manusiawi pada umumnya maupun hak atas kerja manusiawi. Secara khusus, Paus memberi perhatian pada hak kepemilikan alat-alat produksi dalam dunia kerja. Misalnya, kepemilikan bersama atas alat-alat kerja, pembagian dalam manajemen dan keuntungan bisnis di antara para pekerja (*shareholding by labour*) dan sebagainya.

Bagi Paus, pembaharuan ekonomi tak bisa ditempuh dengan menghilangkan kepemilikan privat atas alat-alat produksi atau modal, karena pendekatan ini tidak cukup merealisasi penggunaan bersama alat-alat produksi itu sendiri (*socialization*). Sebab jika alat-alat produksi dialihkan menjadi harta milik masyarakat (kolektivisme), maka pada praktiknya nanti, sekelompok penguasa di masyarakatlah yang akan mengelolanya di tingkat nasional/lokal. Meskipun dari segi prioritas kerja, pemegang otoritas bisa melaksanakan dengan baik perannya, tetapi pengambilalihan dengan cara monopoli administrasi dan pembagian alat-alat produksi sendiri tidak selaras dengan hak-hak dasar manusia. Sebab sosialisasi harta milik hanya terjadi jika tiap pribadi manusia sebagai subjek dalam masyarakat berdasar kerjanya menjadi bagian pemilik atas bengkel kerja besar tempatnya bekerja bersama dengan orang-orang lain.

Menurut Paus, sosialisasi harta milik, selain direalisasi dengan cara mengaitkan kerja dengan kepemilikan modal, juga ditempuh lewat pembentukan badan-badan perantara (*intermediate bodies*) yang bertujuan ekonomi, sosial, dan budaya. Badan-badan itu haruslah dikembangkan untuk mengusahakan tujuan selaras dengan kepentingan umum, di dalam kerja sama satu sama lain, dan disertai otonomi nyata di hadapan kekuasaan publik. Badan-badan itu diharapkan menjadi komunitas yang hidup, yang tiap anggotanya dipandang dan diperlakukan sebagai pribadi dan didorong untuk menjadi bagian komunitas yang aktif.

III. KESIMPULAN

Bagi Paus Yohanes Paulus II, prinsip prioritas kerja atas modal, sebagai jawaban atas konflik antara kerja dan modal, merupakan syarat etis yang harus diwujudkan. Ini merupakan agenda, baik dalam sistem penganut kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi (kapitalisme) ataupun dalam sistem yang membatasi kepemilikan pribadi (sosialisme). Dasarnya adalah kesatuan hakiki kerja dan modal. Atas dasar kesatuan itu, alat-alat produksi, sebagai representasi modal, harus dihubungkan dengan pekerja yang memakainya, sebagai representasi kerja.

Dengan menggarisbawahi bahwa manusia adalah subjek kerja, diharapkan, hasil kerja manusia dapat dimanfaatkan bagi dirinya dan bagi orang lain. Maka, orang yang bekerja perlu ikut serta sebagai pengambil bagian dalam proses kerja dengan tanggung jawab dan kreativitas yang sungguh diterapkan pada dirinya. Maka ada hak-hak khusus terkait dengan kewajiban kerja yang melekat pada diri pekerja.

Selanjutnya harus digarisbawahi bahwa pribadi pekerja tidak boleh dipandang hanya berharap akan remunerasi atas kerjanya, sebab semestinya para pekerja juga menyadari bahwa dalam kerjanya, para pekerja ini bekerja “bagi dirinya”. Kesadaran bekerja bagi diri sendiri ini perlu, juga ketika alat kerja yang digunakannya merupakan milik bersama. Dalam sistem yang terlalu terpusat dan birokratis, kesadaran bahwa manusia bekerja bagi dirinya tidak berkembang. Dalam sistem semacam itu, manusia merasa dirinya hanyalah sekrap belaka dalam sebuah mesin yang digerakkan dari atas. Sistem seperti ini akan membuat pekerja merasa bahwa dalam proses produksi dirinya hanya merupakan alat, bukan subjek kerja sesungguhnya yang memiliki inisiatif (*LE 15*).

Bagi Paus, kerja manusia bukan hanya merupakan perkara ekonomi, tetapi terutama perkara nilai-nilai pribadi, sesuai kodrat manusia beserta martabatnya sebagai pribadi. Maka sistem ekonomi dan proses produksi yang mendatangkan kebaikan adalah sistem dan proses yang menghormati nilai-nilai pribadi. Dalam perspektif personalistik ini, sistem yang mengedepankan kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi merupakan sistem yang didukung, asalkan dalam sistem

tersebut pertimbangan personalistik menjadi dasar pengelolaannya. Di lain pihak, dalam sistem yang dibangun berdasarkan semangat sosialisasi kepemilikan alat-alat produksi (*common use*), penghormatan terhadap nilai-nilai pribadi harus tetap dikedepankan. Dalam sistem seperti ini, kesadaran bahwa orang bekerja bagi dirinya sendiri tetap harus menjadi kriteria yang dijamin perwujudannya.

Menurut Baum, disinilah letak penting kontribusi Paus Yohanes Paulus II dalam dunia kerja, yang disebutnya sebagai “etika politik dan ekonomi yang berorientasi ganda” (*the pope’s brilliant double-oriented economic and political ethics*). Disebut demikian karena pendekatan prioritas kerja atas modal dalam perspektif personalistik ini sekaligus memberikan jawaban terhadap persoalan kapitalisme dan komunisme. Dalam perspektif ini, gerakan buruh dalam semangat solidaritas dan keadilan menjadi faktor penting yang harus didukung, tanpa harus jatuh pada pertentangan kelas ala Marxisme. Sementara kepemilikan pribadi ataupun kolektif para pekerja atas alat-alat produksi merupakan hak yang tidak boleh dicabut, dengan menggarisbawahi nilai alat-alat itu pertama-tama sebagai pelayan kerja demi mewujudkan martabat manusia, mengatasi kepemilikan demi kepemilikan itu sendiri (Marthaler, 2001: 44)

Berdasarkan gagasan Paus tentang prioritas kerja atas modal dan nilai kerja bagi perwujudan diri manusia dalam martabatnya sebagai pribadi, Archer (Malinvaud, 2004: 68) mengangkat masalah pengangguran, yang terus bertambah di berbagai belahan bumi. Menurutnya, pengangguran bukan sekedar eksklusif (peminggiran) dari dunia ekonomi, tetapi sekaligus berarti eksklusif sosial lebih dalam, yang berdampak pada pribadi manusia dan pengembangan dirinya, serta melukai sosialitasnya. Pengangguran mengakibatkan lingkaran masalah pangan, pendidikan dan berbagai aspek lain, termasuk pada anak-anak dan generasi mendatang.

Archer menambahkan perlunya mencermati perubahan bentuk dasar produksi (*changes in the nature of production/productivity*), dari sektor kedua/sekunder (manufaktur) ke sektor ketiga/tersier (jasa). Perubahan ini disertai munculnya kesulitan dalam menghitung dengan tepat kontribusi kerja, pekerjaan dan kreativitas bagi pengembangan ekonomi dan masyarakat. Sementara dalam situasi seperti ini, yang kerap dilakukan hanyalah mendaur ulang daftar lama yang sudah tidak cocok untuk situasi yang baru (Malinvaud, 2004: 68). Kondisi ini makin parah ketika dalam ekonomi digital yang ditandai oleh disrupsi, pendidikan menjadi komoditas yang tergerogoti fondasi hakikat manusiawinya (Kasali, 2018: 228).

Komodifikasi ini selain merambah dunia pendidikan juga merasuki dunia kesehatan, menyentuh pekerjaan tangan maupun pekerjaan mental dan menurut Archer, kerap disertai contoh kejam, ironis dan manipulatif, misalnya dalam

bentuk kursus-kursus baru yang diselenggarakan oleh universitas, yang hanya menyebarkan teknik yang semakin canggih untuk eksploitasi dengan tidak mendahulukan kebutuhan manusia, baik sebagai pekerja maupun dalam hal siapa yang menerima hasil kerja mereka (Malinvaud, 2004: 68).

Mencermati masalah ini, Archer mengusulkan kriteria kebergunaan (*criterion of usefulness*) atas dasar prinsip kesalingterhubungan (*the principle of reciprocity*), alih-alih prinsip pertukaran pasar (*the principle of market exchange*). Kriteria ini sulit diukur dan dikonseptualisasi, tetapi amat berguna, karena meredefinisi batas-batas antara kerja (*work*) dan pekerjaan (*employment*), serta mengakui jenis-jenis kerja tertentu yang seringkali tidak berbayar tetapi bermakna secara pribadi dan sosial, seperti kerja perempuan, wanita rumah tangga, kerja kerelawanan, perawatan orang jompo atau yang sakit kronis, dan sebagainya. Pengakuan ini secara sosial jarang diberikan, padahal memberikan kontribusi yang tak tergantikan bagi keluarga manusia dan kesejahteraannya (Malinvaud, 2004: 68).

Akhirnya Archer membahas keprihatinan global terkait dengan pertumbuhan modal berjumlah besar, yang sama sekali tanpa hubungan dengan produktivitas atau kesejahteraan manusia. Misalnya, keuntungan spekulatif murni di pasar pertukaran keuangan internasional. Menurutnya, di sini relevan berbicara tentang perpajakan atas keuntungan spekulatif itu, melalui instrumen yang dikenal dengan Pajak Tobin (*Tobin Tax*). Tapi sekaligus lebih jauh, pendapatan kena pajak ini semestinya diarahkan ke Dunia Ketiga, seperti disarankan oleh PBB. Mengingat bahwa bantuan kepada Dunia Ketiga kerap dihadapkan pada masalah korupsi dan penyalahgunaan, maka gagasan peningkatan pendapatan pajak internasional atas keuntungan spekulatif ini harus dipromosikan bagi proyek pendidikan, mengingat proyek pendidikan di negara berkembang kurang terbuka terhadap korupsi dan penyesatan sumber daya, dibandingkan dengan jenis bantuan lain yang dapat diberikan (Malinvaud, 2004: 68).

Demikianlah catatan Baum dan Archer, yang secara khusus mendiskusikan visi personalistik Paus Yohanes Paulus II tentang prioritas kerja atas modal sebagai solusi atas konflik kerja dan modal dalam *Laborem Exercens*, menegaskan relevansi dan kontribusi Paus bagi kehidupan ekonomi dan penghormatan martabat manusia. Maka, pemahaman tentang hakikat kerja dan hakikat manusia sebagai pekerja (*homo laborans*) ditinjau dari perspektif personalisme yang dielaborasi oleh Paus Yohanes Paulus II, menurut penulis, mendesak untuk disebarkan dan diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baum, Gregory G., 2001, "John Paul II's Economic Teaching: A Call for Spiritual, Moral and Structural Conversion", dalam Berard L. Marthaler et.al. (eds.), 2001. *New Catholic Encyclopedia. Jubilee Volume. The Woytjla Years*. New York: Gale Group. 43-51
- Kasali, Rhenald, 2018, *The Great Shifting*. Gramedia: Jakarta.
- Larrivee, John, 2009, "The Subjective Dimension of Work. Reflections on *Compendium* Chapter 6", dalam *Catholic social thought: American reflections on the Compendium*. Sullins, D. Paul dan Blasi, Anthony J. (eds.). Lanham: Lexington Books. 43-75
- Malinvaud, Edmond (ed.), 2004, *Forum on the Meaning of the Priority of Labour*. Vatican City: The Pontifical Academy of Social Sciences
- Paul II, John, 1981, *Laborem Exercens (LE)*", dalam https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091981_laborem-exercens.html. Versi Indonesia dalam <http://ajaransosialgerejakatolik.blogspot.com/2012/03/laborem-exercens-dengan-bekerja.html>
- Shadle, Matthew Allen, 2018, *Interrupting Capitalism: Catholic Social Thought and the Economy*. New York: Oxford University Press
- Silver, Beverly J, 1995, "World-Scale Patterns of Labor-Capital Conflict: Labor Unrest, Long Waves, and Cycles of World Hegemony". *Labor Unrest in the World-Economy, 1870–1990*, Vol. 18, No. 1. 155-192
- Sørensen, Michael Kuur, 2006, "Capital and Labour: Can The Conflict Be Solved?", dalam *The Interdisciplinary Journal of International Studies*, Vol. 4, 29-48